

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pembebasan Lahan Terhambat

Pancoran, Warta Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pemukiman di Bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

Heru tiba di sana sekira pukul 14.30 WIB dan langsung melihat peta pembebasan lahan yang bakal dijadikan perluasan kali Ciliwung.

Pria berkemeja itu kemudian juga memasuki area pemukiman yang telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia bertemu dengan warga dan mendengar keluhan hambatan

pembebasan lahan di sana.

"Warga suratnya hilang ini sedang diproses dari Kepala Kantor Pertanahan dan masalah surat keterangan dari kepolisian sedang diproses," katanya.

Menurut Heru, banyak warga yang membuat surat kehilangan untuk mengurus sertifikat rumah agar bisa diproses pembebasan lahannya.

Sebab, tanpa ada surat sah kepemilikan lahan, Pemprov DKI tidak mau membayarkan uang pembebasan lahan ke warga.

"Kemarin sudah ada 12 yang

SPH tadi dengan Bu RW juga menyampaikan memang surat hilang luasnya sama sesuai dengan mereka tinggal itu lebih bisa mudah diproses," tegasnya.

Namun, ada juga warga yang membuat surat kehilangan tapi luas PBB yang tercantum di PPD tidak sesuai.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bakal lebih mendahulukan proses pembuatan dokumen kepemilikan tanah di sana ke warga yang PBB-nya sesuai.

"Mana yang mudah diselesaikan dengan cepat terus berikutnya dari Balai Besar memang masih melakukan pembangunan sipel dari sisi sebelah kiri saya sepanjang 500 meter," ungkapnya.

Ganti Untung

Sementara itu Heru memastikan Pemprov bakal memberikan ganti untung ke pemilik lahan di Bantaran Kali Ciliwung Rawajati, Jakarta Selatan.

Namun, pemilik lahan harus segera melengkapi persyaratan agar ganti untung itu segera dicairkan seperti surat kepemilikan tanah.

Menurutnya, masih ada 18 bidang

tanah yang belum dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta karena masalah surat kepemilikan lahan.

"Sudah diganti, ada yang sudah sampai naik haji kok suaminya bu RW," katanya di lokasi, Senin (8/5/2023).

Heru mengaku akan menyelesaikan pembebasan lahan di sana dan membayar sesuai dengan luas yang dimiliki.

Sejauh ini, warga yang bertahan belum mau dipindahkan ke Rumah Susun Sewa milik Pemprov DKI Jakarta.

Mereka masih bertetap ingin mendapatkan uang dari Pemprov DKI Jakarta dari hasil penggusuran rumah.

"Sampai sekarang tidak ada yang pindah dan yang punya lahan kita pasti bayar," ucap Heru.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan dengan total 40 rumah di bantaran kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan sekira enam bulan lalu.

Rencananya, lahan yang dibebaskan itu bakal digunakan untuk pelebaran kali Ciliwung supaya warga sekitar tak lagi merasakan banjir. (m26)